

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

Definisi Akuntansi seraca harfiah

Dalam dunia bisnis, akuntansi adalah suatu cara menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan keputusan dalam suatu bisnis. Selain itu, berbagai lembaga menggunakan akuntansi dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Standar Akuntansi Keuangan baik yang merujuk kepada format yang ditentukan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia khusus wilayah Indonesia sedangkan untuk Negara lain merujuk kepada Standar Akuntansi Internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB).

1. Pengertian dari Akuntansi Sektor Publik

Organisasi Sektor Publik adalah organisasi yang bergerak khusus di bidang publik yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau bisa bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi dan keuangan tapi berbeda dengan organisasi komersial yang memiliki tujuan utama yaitu mencari keuntungan semata sedangkan organisasi sektor publik tidak dikelola untuk mencari laba semata.

Dalam akuntansi sektor publik sering juga dikenal dengan akuntansi yang mengelola uang rakyat, yaitu salah satu jenis akuntansi yang diterapkan dalam organisasi sektor publik. Akuntansi Sektor Publik sering diterapkan pada lembaga negara baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen milik pemerintah, badan usaha negara dan daerah, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan sosial.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah suatu pengelolaan yang operasionalnya berhubungan dengan usaha baik itu berbentuk barang ataupun jasa, sehingga akuntansi sektor publik sangat berkaitan erat dengan keuangan untuk pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan instansi dan juga menjadi hak publik yang didapat masyarakat melalui pelayanan publik yang dihasilkan oleh instansi.

2. Kategori Organisasi Sektor Publik

Secara garis besar, kategori dari organisasi sektor publik yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian.

1) Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah adalah organisasi sektor publik yang berwujud instansi pemerintah seperti Pemerintah Pusat yang terdiri dari kementerian, lembaga dan badan negara, dan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/ kota.

2) Organisasi Non Profit Milik Pemerintah

Organisasi Non Profit milik pemerintah adalah organisasi sektor publik yang dimiliki oleh pemerintah tetapi bukan termasuk instansi pemerintah, diantaranya universitas/ perguruan tinggi milik negara, rumah sakit milik pemerintah, dan yayasan yang dimiliki pemerintah.

3) Organisasi Non Profit Milik Swasta.

Organisasi non profit milik swasta adalah organisasi sektor publik yang kepemilikannya dimiliki dan diorganisir oleh pihak swasta, diantaranya instansi pendidikan swasta, yayasan milik swasta, rumah sakit yang dimiliki swasta.

3. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Secara garis besar karakteristik yang terdapat dalam akuntansi sektor publik yang bisa diidentifikasi diantaranya:

- 1) Akuntansi sektor publik tidak mengutamakan laba sehingga didalam akuntansi sektor publik tidak ada laporan laba rugi dan perlakuan ddi dalam akuntansi yang berkaitan lembaga tersebut.
- 2) Dalam akuntansi sektor publik memiliki pembukuan anggaran ketika anggaran periode tersebut ditetapkan. Anggaran merupakan hal yang penting yang harus di masukan dalam pembukuan dikarenakan merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut..
- 3) Didalam akuntansi Sektor Publik dapat memungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis sumber dana.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1. Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Di Negara Republik Indonesia yang mengatur akuntansi pemerintah melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah peraturan yang memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan adanya standar ini, dapat diharapkan bahwa laporan keuangan pemerintah yang berasal dari proses pembukuan akuntansi dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab agar pengelolaan keuangan negara menjadi transparan dan adil. Standar Akuntansi Pemerintah adalah bimbingan atau pedoman yang mampu menyatukan pendapat pembuat dan pengguna.

Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten atau kota, dan juga lembaga pemerintahan yang lain

diharuskan menyampaikan laporan keuangan selaras dengan panduan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah akan digunakan oleh pengguna untuk menganalisa dan memahami isi data yang disampaikan dalam laporan keuangan. Pengguna yang dimaksud ialah khalayak umum baik itu perseorangan maupun dari organisasi seperti badan legislatif dan Badan Pemeriksa Keuangan yang akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dasar fondasi pelaksanaan audit.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar atau prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan pemerintahan memuat tujuan yang umum dalam pelaporan keuangan tetapi lembaga atau instansi masih bisa membuat laporan keuangan untuk kebutuhan khusus yang masih menganut Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan disusun oleh komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah menyediakan dasar hukum bagi pemerintah pusat, daerah, dan instansi atau lembaga non profit lainnya untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran anggaran secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Tujuan Dibentuknya Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki tujuan untuk panduan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dan sebagai penyajian kepada pengguna dan auditor yang dapat meningkatkan kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas

anggaran negara. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah memiliki tujuan utama diantara lain:

- 1) Penyajian Laporan Keuangan, dalam standar akuntansi pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, dan antar entitas.
- 2) Keterbandingan dan Transparansi, standar akuntansi pemerintah memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan, termasuk lembaga legislatif, dengan menetapkan pedoman struktur dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
- 3) Basis Akrual, dalam laporan keuangan yang disusun dengan menerapkan basis akrual untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lainnya.
- 4) Pedoman Penyusunan, dalam standar akuntansi pemerintah dapat menyediakan acuan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.

2.2. Penerapan yang Standar Akuntansi Sektor Publik di dalam Laporan Keuangan KPU Kabupaten Purbalingga

Dalam penerapan standar akuntansi publik yang digunakan KPU Purbalingga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah, dengan demikian laporan keuangan pemerintah dapat memberikan karakteristik transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah dalam pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah yang dapat menyediakan informasi

keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, standar akuntansi pemerintah mempunyai kekuatan hukum yang diteatapkan oleh Undang - Undang.

Tujuan utama penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah untuk membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh orang yang menggunakannya, mencegah kesalahpahaman antara penyusun dan pengguna laporan keuangan, dan memastikan bahwa laporan keuangan memiliki kepercayaan kepada pengguna dan auditor.

Laporan Keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari bagian - bagian yang termasuk dalam satu kesatuan laporan keuangan terdiri dari laporan yang berbasis kas dan berbasis akrual, sehingga seluruh bagian yang membentuk laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Arus Kas
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca.
5. Laporan Operasional.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan sebagai catatan bahwa bagian dari laporan keuangan pemerintah tersebut disajikan dalam setiap entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

2.3. Alur Dari Analisis Laporan Keuangan.

Berikut ini adalah flowchart yang menampilkan teori menganalisa Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga:

Gambar 4. Flowchart

